

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi dan teknologi mengalami banyak kemajuan yang telah menjangkau segala aspek, kemajuan tersebut juga menjangkau sistem pengelolaan keuangan sehingga mengalami banyak perkembangan. Saat ini, pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan standar laporan keuangan dengan harapan dapat mengikuti kemajuan akuntansi dan menawarkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Publikasi informasi terkait laporan keuangan yang tersedia untuk seluruh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat, pihak yang berkepentingan selanjutnya akan menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan. Pemerintahan daerah dalam menyusun laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam disiplin ilmunya yang berperan penting sebagai penggerak informasi yang tersedia untuk mendapatkan hasil terbaik. Sistem tersebut dapat digunakan secara efektif oleh personel yang terampil untuk memberikan hasil keuangan atau laporan berkualitas tinggi.

PP No. 60 (2008) menyatakan: Sistem pengendalian internal ini mengatur pengawasan pelaporan keuangan yang tepat dan efisien serta penguasaan internal pemerintah pusat dan daerah. Membangun sistem pengendalian internal akan meningkatkan objektivitas dan keandalan informasi, mencegah ketidaksesuaian, dan memfasilitasi audit

Kebijakan fiskal pemerintah dan stabilitas sistem keuangan harus tetap stabil dan konstan dalam perannya melawan Covid-19. UU No 1 Tahun 2020 mengatur definisi pandemi. Berdasarkan Pemerintah Daerah *UU Nomor 9 (2015)*, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan ketetapan tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah asas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah” (*PP Nomor 71 Tahun 2010*). Pemberlakuan di bawah ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Tentunya undang-undang ini akan membuat pelaporan keuangan menjadi lebih kualitatif dan akuntabel (Tamasoa,2021). Akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab atas tercapai atau tidaknya kinerja suatu perusahaan. pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dilakukan dengan menggunakan media pertanggungjawaban yang berulang.

Proses penyusunan laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai auditor pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun akan mengkaji dan mengevaluasi kualitas laporan tersebut. LKPD yang diberikan dan diungkapkan oleh BPK akan memperoleh Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian apabila adil dan berkualitas dalam hal pendapat laporan keuangan BPK atas laporan pertanggungjawabannya. Berdasarkan temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas nama Provinsi Jawa Timur. BPK Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan (LHP) LKPD Kota Madiun Tahun 2021 diterima dengan opini wajar tanpa Pengecualian. Pemeriksaan LKPD Kota Madiun Tahun 2021 oleh BPK masih menemukan sejumlah permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pajak restoran belum optimal, pengembalian ketua DPRD ke rumah negara tidak berdasarkan analisis kebutuhan, dan kenaikan tunjangan perumahan DPRD Kota Madiun tidak didukung dengan perhitungan yang memadai, antara lain hal-hal lain, meskipun tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun (Jatim.bpk.go.id).

BPK meminta tanggapan Pemkot Madiun atas hasil kajian BPK sebelum menyerahkan LHP 2021 ke LKPD. Termasuk rencana aksi yang akan dipertimbangkan oleh DPRD Kota Madiun. Merupakan suatu kehormatan bagi Kota Madiun untuk mempertahankan predikat Opini WTP selama tiga tahun sejak tahun 2019. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah yang baik. Berdasarkan fenomena yang ada, LKPD Kota Madiun sudah mencakup unsur penting dari sebuah LKPD yaitu telah memenuhi persyaratan kriteria penyajian informasi serta telah memenuhi karakteristik kualitatif, keduanya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Melihat

fenomena yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di Kota Madiun dengan mereplikasi Safitri & Zulkarnain (2021) berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pada Laporan Keuangan Pemerintah” Peneliti memilih objek penelitian yang berbeda yaitu di Kota Madiun. Sampel pada penelitian sebelumnya hanya meneliti pada satu OPD yaitu pegawai BPKAD Kota Bogor bagian akuntansi keuangan, sedangkan penelitian saya mengambil sampel kepala bagian keuangan di 10 OPD Kota Madiun.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris bahwa:

1. Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kompetensi sumber daya manusia.
2. Sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap riset ini dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Akademisi

Dapat menjadi wacana riset empiris untuk akademisi dan dapat menjadi inspirasi serta memberikan kontribusi pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Bagi pemerintah daerah

Dapat digunakan sebagai referensi bagi LKPD sesuai aturan yang berlaku dan memberikan wawasan tentang dampak kemampuan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, tujuan serta manfaat yang diharapkan, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kajian pustaka membahas tentang kajian teoritis, penelitian terdahulu, menjelaskan kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian membahas tentang metodologi penelitian, variabel penelitian, pemilihan sampel penelitian, kategori dan sumber penelitian, dan metodologi analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Mendesripsikan data penelitian, temuan penelitian, dan interpretasi temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan

Menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.